



ANALISIS PENGARUH REALISASI BELANJA PEGAWAI, BELANJA BARANG, DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEBELUM DAN MASA PANDEMI COVID-19

Agustina Darmayanti*
Fakultas Akuntansi, Perbanas Institute, Jakarta
agustinadarmayanti04@gmail.com

*Alamat Korespondensi: agustinadarmayanti04@gmail.com

ABSTRACT

This research is conducted to analyse the effect of Employee, Product and Capital Expenditure Realization to Government Institutions' Performance Before and During Covid-19 Pandemic. The case study is conducted on the Directorate General of Public Health from the first quarter to the third quarter of the 2021 fiscal year. This research is expected to provide input to Government in order to maintain the perf their institutions' performance, in this case Budget Implementation Indicator (IKPA) so that the resulting performance can lead to the successful implementation of the budget in accordance with existing regulations. Data is gathered by observing financial realization and IKPA from Ministry of Finance website. Data is processed by using classic assumption test dan panel regression to acquire correlation between independent and dependent variables. Based on data testing, it shows that Product Expenditure Realization has a significantly positive effect on Government Institutions' performance before and during Covid-19 Pandemic. Employee and Capital Expenditure Realization do not have a significantly positive effect on Government Institutions' performance before and during Covid-19 Pandemic. Additionally, there are no differences on Government Institutions' performance before and during Covid-19 Pandemic due to government policy.

Keywords: Employee Expenditure Realization, Product Expenditure Realization, Capital Expenditure Realization, Government Institutions' Performance, Budget Implementation Indicator (IKPA)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh realisasi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal terhadap kinerja instansi pemerintah sebelum dan masa Pandemi Covid-19. Studi kasus dilakukan pada satuan kerja Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Triwulan I Tahun Anggaran 2018 s.d. Triwulan III Tahun Anggaran 2021. Diharapkan dengan penelitian ini memberikan masukan kepada pemerintah untuk menjaga kinerja instansi pemerintah dalam hal ini Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA), sehingga kinerja dihasilkan dapat menjadi keberhasilan atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan yang ada. Pengumpulan data dengan melihat laporan realisasi keuangan dan IKPA yang diambil dari website Kementerian Keuangan. Analisis uji asumsi klasik dan uji regresi data panel digunakan untuk mengolah data guna memperoleh hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Hasil dari pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa realisasi belanja barang berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja instansi pemerintah sebelum bahkan pada masa pandemi Covid-19. Realisasi belanja pegawai dan belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah sebelum bahkan pada masa pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil pengujian realisasi belanja barang, belanja pegawai dan belanja modal sebelum maupun pada masa pandemi Covid-19 menunjukkan tidak ada perbedaan, hal ini karena adanya peran pemerintah dalam memberikan kebijakan.

Kata kunci: Realisasi Belanja Pegawai, Belanja modal, Belanja barang, Kinerja Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

KLASIFIKASI JEL: H11, H50

CARA MENGUTIP:

Darmayanti, A. (2024). Analisis pengaruh realisasi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal terhadap kinerja instansi pemerintah sebelum dan masa pandemi Covid-19. *Jurnal Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 9(3), 247-256.

PENDAHULUAN

Dalam mewujudkan *good governance* yang baik dalam tata pemerintahan dapat dilakukan upaya konkret dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Dalam menyusun anggaran perlu mempertimbangkan perkiraan kondisi dimasa depan. Namun permasalahan lainnya datang dari eksternal diluar kendali dan sulit untuk diprediksi. Kemampuan prediksi anggaran dapat menentukan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Teori *Stewardship* menggambarkan pemerintah tidak dimotivasi oleh tujuan pribadi, tetapi mengejar tujuan hasil utama untuk kepentingan publik. Pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini membuat pemerintah perlu mengukur perbandingan antara yang dituju (anggaran) dengan yang telah dicapai (laporan perhitungan anggaran).

Beberapa jenis belanja dalam APBN, antara lain belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial. Dalam pelaksanaan anggaran belanja, pemerintah dituntut untuk melaksanakan anggaran tersebut secara tepat, guna mencapai realisasi yang maksimal. Capaian realisasi ini masih dianggap sebagai capaian kinerja.

Penilaian kinerja tidak lepas dari capaian realisasinya sebagaimana pemberlakuan IKPA oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2018 sesuai peraturan PMK Nomor 195/PMK.05/2018 mengenai Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga. IKPA dibagi menjadi 4 aspek yaitu (1) Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan Anggaran, (2) menaati peraturan, (3) keefektifan pelaksanaan kegiatan, dan (4) keefesienan pada Pelaksanaan Kegiatan.

Pada tahun 2020, Indonesia menghadapi pandemi Covid-19. Hal ini berdampak pada seluruh sektor termasuk pada instansi pemerintah. Sebagaimana diketahui adanya kebijakan pemerintah terhadap penanganan pandemi Covid-19 dengan diterapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang membuat sistem kerja berubah dengan adanya *Work From Home* (WFH). Hal tersebut membuat pelaksanaan anggaran dan kegiatan tidak berjalan sebagaimana perencanaan. Kebijakan lainnya yang dikeluarkan pemerintah yakni program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) salah satunya untuk kesehatan. Kementerian Kesehatan mendukung program PEN kesehatan melalui efisiensi anggaran. Kondisi pandemi Covid-19 ini, menuntut instansi pemerintah untuk tetap mempertahankan kinerjanya.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menangani kinerja pemerintahan indikator kinerja

PENERAPAN DALAM PRAKTIK

- Realisasi belanja Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2018-2020 menunjukkan peningkatan.
- Hasil IKPA Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2018-2020 menunjukkan penurunan.
- Pada Tahun 2020, Indonesia dihadapkan dengan wabah covid-19, yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada instansi pemerintahan.
- Pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan sebagai bentuk antisipasi dalam menghadapi pandemi Covid-19.

pelaksanaan anggaran (IKPA) yang di nilai pada tahun 2020 melalui aplikasi OM-SPAN berdasarkan pada surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-258/PB/2020 pada tanggal 23 Maret 2020. Kebijakan tersebut dikeluarkan sebagai langkah tentatif untuk menyesuaikan kebijakan dalam melaksanakan anggaran K/L karena kondisi *force majeure* akibat risiko penyebaran Covid-19. Upaya pemerintah dalam menghadapi peralihan masa Covid-19 menjadi *new normal* dengan melakukan pemulihan ekonomi nasional, Direktur Jenderal Perbendaharaan mengeluarkan surat Nomor ND-562/PB/2020 pada tanggal 5 Agustus 2020 hal pencabutan kebijakan relaksasi penilaian IKPA tahun 2020 dan melaksanakan kebijakan re-evaluasi K/L IKPA mulai triwulan III tahun 2020.

Penelitian Yusuf (2018) menunjukkan bahwa realisasi belanja (pegawai, barang, dan modal) berpengaruh signifikan positif terhadap efisiensi kinerja pemerintah sedangkan realisasi belanja (pegawai, barang, dan modal) tidak berpengaruh signifikan terhadap efektifitas kinerja pemerintah. Hasil yang sama dengan Andirfa et al. (2016), Waryanto (2017), Mulyani & Wibowo (2017), dan Sari & Mustanda (2019) bahwa belanja modal berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun memiliki perbedaan atas penelitian yang dilakukan Defitri (2020), Darwis (2015), Wahyuni & Ardini (2018), dan Antari & Sedana (2018) menunjukkan bahwa belanja modal memiliki dampak yang negatif dan signifikan dalam kinerja keuangan. Memperhatikan adanya perbedaan dan masih sedikit hasil penelitian, serta belum ada penelitian berkaitan dengan kinerja pemerintah pada masa pandemi Covid-19, peneliti tertarik melakukan analisis pengaruh realisasi belanja terhadap kinerja dengan pengukuran IKPA dengan pengujian kuantitatif membandingkan kedua kondisi sebelum dan masa pandemi Covid-19.

Berdasarkan perbedaan hasil penelitian terkait analisis realisasi belanja terhadap kinerja instansi pemerintah dan fenomena kondisi pandemi

Covid-19, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) apakah realisasi anggaran belanja pegawai dapat memengaruhi kinerja instansi pemerintah saat sebelum maupun saat pandemi Covid-19, (2) apakah realisasi anggaran belanja barang mempunyai pengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah sebelum maupun pada saat pandemi Covid-19, dan (3) apakah realisasi anggaran belanja modal mempunyai pengaruh atas kinerja instansi pemerintah sebelum maupun pada saat pandemi Covid-19.

Hasil penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis hubungan antara realisasi anggaran belanja pegawai terhadap kinerja instansi pemerintah dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan membandingkan kondisi sebelum dan masa pandemi Covid-19, (2) menganalisis hubungan antara realisasi anggaran belanja barang terhadap kinerja instansi pemerintah dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan membandingkan kondisi sebelum dan masa pandemi Covid-19, (3) menganalisis hubungan antara realisasi anggaran belanja modal terhadap kinerja instansi pemerintah dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan membandingkan kondisi sebelum dan masa pandemi Covid-19. Penelitian ini mencoba berkontribusi dalam menambah literatur antara hubungan realisasi belanja dengan kinerja pemerintah dengan pendekatan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang menjadi tolak ukur kinerja setiap tahunnya.

STUDI LITERATUR

Stewardship Theory

"*Stewardship theory*" ialah teori yang mendasari penelitian ini. Teori *Stewardship* diperkenalkan sebagai teori telah disajikan sebagai teori yang mendasari perilaku dan pendahulunya (Davis et al., 1997). Dalam teori ini manajemen adalah aktor yang mampu mengambil tindakan terbaik untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan.

Stakeholder tidak mempunyai keinginan untuk memuaskan kepentingan diri mereka sendiri, melainkan untuk memenuhi kebutuhan tertinggi dari hierarki kebutuhan Maslow, yaitu aktualisasi diri dan kepuasan kerja untuk menghindari konflik kepentingan antara pemangku kepentingan dan manajemen yang menjalankan fungsi eksekutif organisasi. Selain itu, manajer akan mengutamakan kepercayaan atau keyakinan publik pada prinsip bahwa manajer mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mengelola dan mengalokasikan sumber daya yang tersedia secara bijaksana dan hati-hati, untuk memberikan pelayanan kepada kebutuhan masyarakat luas secara seragam. Apabila tujuan mampu tercapai oleh manajemen yakni pencapaian aktualisasi diri yang sudah terpenuhi dan dengan

kepercayaan publik, mereka tidak lagi menginginkan hal-hal yang bersifat materiil.

Realisasi Anggaran

Menurut Prasetya (2005), realisasi anggaran adalah laporan yang menggambarkan perbandingan anggaran pendapatan dan belanja dengan kinerja anggaran yang menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengukuran penyerapan anggaran belanja menurut Mahmudi (2010), dilakukan dengan melakukan perbandingan antara realisasi anggaran belanja dan pagu anggaran belanja.

Klasifikasi Belanja Pemerintah

Dalam Peraturan Menteri Keuangan No 101/PMK.02/2011 mengenai Klasifikasi Anggaran, disebutkan belanja penyelenggaraan pemerintah pusat yang terdiri atas (1) Belanja pegawai, merupakan kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat Negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah, (2) Belanja barang, merupakan Pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis dipakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan, dan (3) Belanja modal, merupakan pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/ aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Kinerja Instansi Pemerintah

Kinerja instansi pemerintah menurut LAN (2003), yakni gambaran sejauh mana tujuan atau sasaran instansi pemerintah telah tercapai sebagaimana perkembangan visi dan misi, serta strategi instansi pemerintah menunjukkan berhasil serta gagalnya dalam kegiatan yang dilaksanakan selaras dengan apa yang telah ditetapkan dalam program tersebut. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006, kinerja merupakan hasil keluaran dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai atas penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Dalam organisasi sektor publik, tidak mudah untuk mengukur kinerja, terutama di organisasi nirlaba murni seperti pemerintah. Sampai saat ini, sulit untuk mengukur keberhasilan instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokoknya.

Capaian kinerja suatu instansi, salah satunya dapat dilihat melalui penyerapan anggaran APBN yang maksimal, walaupun kualitasnya rendah. Hal ini yang membuat sektor publik sulit diukur kinerjanya.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Sesuai dengan aturan yang ada, maka indikator kinerja pelaksanaan anggaran harus mematuhi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 mengenai evaluasi pelaksanaan anggaran belanja serta monitoring IKPA yaitu indeks yang dikatakan oleh BUN dengan Kementerian Keuangan guna mengukur kualitas kegiatan kepatuhan dalam anggaran Kementerian Negara yang ditinjau melalui tingkat kepatuhan terhadap perencanaan, lalu efisiensi dalam melaksanakan anggaran, serta kepatuhan kepada peraturan yang ada.

Formulasi IKPA:

$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^{13} (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot}$$

Penelitian Terdahulu

Penelitian rujukan dilakukan oleh Yusuf (2018) membuktikan bahwa: (1) Belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap efisiensi kinerja pemerintah; dengan meningkatnya anggaran pegawai, belanja, dan modal, maka berdampak pada peningkatan efisiensi kinerja Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak; (2) Belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal tidak mempunyai dampak yang signifikan kepada efektivitas kinerja pemerintah pada Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.

Penelitian Andirfa et al. (2016) memperlihatkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sampai batas tertentu. Selain itu penelitian Waryanto (2017) menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal yang sama juga dilakukan melalui penelitian Mulyani & Wibowo (2017) dan Sari & Mustanda (2019) menunjukkan belanja modal memiliki dampak positif yang signifikan atas kinerja pemerintah. Namun hasil dari penelitian yang sudah dilakukan oleh Darwis (2015), Wahyuni & Ardini (2018), dan Antari & Sedana (2018) berbeda dengan menunjukkan bahwa belanja modal memiliki dampak negatif yang signifikan atas kinerja keuangan.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Defitri (2020) mengenai pengaruh belanja dengan kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa (1) Meskipun belanja modal berdampak pada kemandirian keuangan daerah, namun tidak merata atau rendah, sehingga mengakibatkan disparitas kemandirian keuangan yang besar antar

daerah; (2) Belanja pegawai di satu sisi memiliki dampak yang positif terhadap kemandirian daerah karena dapat membantu perangkat daerah berjalan lebih efisien, namun di sisi lain, melonjaknya belanja pegawai juga dapat berdampak negatif terhadap belanja daerah, serta memengaruhi stabilitas keuangan daerah.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data panel regresi linier dengan metode analisis kuantitatif. Penelitian dilakukan pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan. Jumlah populasi yang digunakan berjumlah 645 data. Data ini merupakan Laporan Realisasi Anggaran dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dalam kurun waktu Triwulan I Tahun Anggaran 2018-Triwulan III Tahun Anggaran 2021.

Pengembangan Hipotesis

Hasil penelitian yang dilakukan Yusuf (2018) menunjukkan bahwa belanja pegawai mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap efisiensi kinerja pemerintah pada Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak. Penelitian lainnya yang dilakukan Darwis (2015) dan Wahyuni & Ardini (2018) menunjukkan bahwa belanja pegawai berdampak negatif yang signifikan kepada tingkat kemandirian keuangan daerah. Jumlah belanja pegawai yang meningkat menyebabkan penurunan kemandirian keuangan daerah, dan stabilitas keuangan daerah dapat terbebani sebagai akibat dari peningkatan ini.

Namun hasil penelitian dari Waryanto (2017), bahwa beban operasional yang ada pada belanja pegawai, belanja barang, beban bunga pinjaman, bantuan hibah dan bansos tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Perlu dicatat bahwa semua sektor masyarakat dan pemerintah harus mempertimbangkan bahwa belanja operasional, termasuk belanja pegawai, masih belum dapat berperan signifikan dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Penelitian Yusuf (2018), menunjukkan bahwa belanja pegawai tidak berpengaruh signifikan terhadap efektifitas kinerja pemerintah pada Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak. Berdasarkan hasil uraian di atas sehingga bisa dirumuskan suatu hipotesis penelitian ini yaitu:

H1 = Realisasi belanja pegawai mempunyai pengaruh yang positif terhadap kinerja instansi pemerintah sebelum dan masa Pandemi Covid-19

Hasil berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Waryanto (2017), bahwa belanja operasional, seperti gaji, tunjangan, pajak barang, bunga pinjaman, hibah, dan bentuk bantuan

keuangan lainnya, tidak banyak berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran operasional termasuk pengeluaran barang, tidak dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian yang sama dilakukan Yusuf (2018), membuktikan bahwa belanja barang tidak mempunyai pengaruh kepada efisiensi kinerja.

Hasil penelitian Yusuf (2018), menunjukkan bahwa belanja barang berpengaruh signifikan positif terhadap efisien kinerja pemerintah pada Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak. Dapat dijelaskan bahwa dengan realisasi anggaran belanja barang yang semakin meningkat, maka hal tersebut berdampak pada meningkatnya efisiensi kinerja dari Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak. melalui hasil uraian di atas sehingga bisa dirumuskan suatu hipotesis penelitian ini yaitu:

H2 = Realisasi belanja barang mempunyai pengaruh yang positif terhadap kinerja instansi pemerintah sebelum dan masa Pandemi Covid-19

Menurut penelitian Ariani & Putri (2016), bahwa belanja modal mempunyai pengaruh yang signifikan positif kepada tingkat kemandirian keuangan daerah. Kemakmuran daerah selalu merupakan akibat langsung dari pemerintahan daerah yang efektif dan pelayanan publik yang berkualitas pemerintah daerah menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna melakukan pembelanjaan pada daerah tersebut, termasuk belanja modal. Belanja modal ini nantinya diterjemahkan guna membangun sebuah daerah serta memperbaiki daerah di berbagai bidang. Hasil penelitian yang sama dilakukan Ernawati & Riharjo (2017), Waryanto (2017), Mulyani & Wibowo (2017), Yusuf (2018), dan Sari & Mustanda (2019) membuktikan bahwa belanja modal memiliki dampak yang positif signifikan kepada kinerja keuangan.

Namun, penelitian yang dilakukan oleh Imawan & Wahyudin (2014), bahwa belanja modal secara parsial tidak mempunyai pengaruh positif signifikan atas kemandirian keuangan daerah. Penelitian dengan hasil yang sama dilakukan oleh Yusuf (2018) dan Wahyuni & Ardini (2018) bahwa Efisiensi kinerja pemerintah tidak terpengaruh oleh belanja modal. Sebagai hasil dari data yang disajikan, berikut adalah kemungkinan rumusan hipotesis penelitian:

H3 = Realisasi belanja modal mempunyai pengaruh yang positif terhadap kinerja instansi pemerintah sebelum dan masa Pandemi Covid-19

Data dan Variabel

Penelitian ini menggunakan data sekunder dan diolah menggunakan *evIEWS* dengan data panel. Data ini diambil saat periode Triwulan I Tahun Anggaran 2018-Triwulan III Tahun Anggaran 2021. Data merupakan Laporan Realisasi Anggaran serta IKPA dari website Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan.

Penelitian ini memakai 3 variabel independen yaitu realisasi belanja pegawai, barang, dan modal, dan variabel dependen yakni Kinerja Instansi Pemerintah. Ketiga variabel independen diukur dengan membagi realisasi belanja dengan total anggaran belanja (Mahmudi, 2010), sedangkan variabel dependen Pengukuran kinerja instansi pemerintah diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dalam no 195/PMK.05/2018.

Model Penelitian

Dalam pengujian hipotesis maka model penelitian yang digunakan sebagai berikut:

$$IKPA_{it} = \alpha + \beta_1 BPeg_{it} + \beta_2 BBar_{it} + \beta_1 BMod_{it} + e$$

Keterangan:

IKPA = Kinerja Instansi Pemerintah

BPeg = Realisasi Belanja Pegawai

BBar = Realisasi Belanja Barang

BMod = Realisasi Belanja Modal

α = Konstanta

e = Error

i = Data Unit Analisis (Satuan Kerja)

t = Data Triwulan

Model Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan estimasi model regresi dengan 3 model yaitu *Common Effect Model (CEM)*, *Fixed Effect Model (FEM)*, serta *Random Effect Model (REM)*. Regresi linier digunakan untuk mengolah data. Analisis regresi linier merupakan suatu cara untuk mengetahui seberapa besar koefisien-koefisien dalam penelitian tersebut.

Pengujian untuk memilih 3 model tersebut dilakukan uji Chow, uji Hausman, serta uji Langrange. Pengujian ini dilakukan dengan data panel dan model data panel. Ini akan memberikan hasil terbaik dalam pengujian, jadi beginilah cara melakukannya. Selanjutnya, untuk mendapatkan persamaan regresi dengan estimasi pemodelan yang tepat, tidak bias, dan konsisten, maka dilakukan pengujian asumsi klasik.

Uji Normalitas, yang memiliki tujuan untuk menentukan apakah variabel pengganggu atau residual dalam model regresi berdistribusi normal. (Ghozali, 2011). Uji normalitas hanya digunakan jika jumlah pengamatan kurang dari 30, jika tidak maka tidak diperlukan karena distribusi istilah kesalahan pengambilan sampel mendekati normal (Ajija et al., 2011). Pada penelitian ini jumlah

observasi yang digunakan adalah 645 titik data, sehingga uji normalitas dapat dihilangkan.

Uji Heteroskedastisitas, bertujuan dalam meneliti varians *error term* dari setiap *error term* adalah perbedaan antara nilai aktual suatu pengamatan dua nilai yang diprediksi dari suatu populasi pengamatan (Freddy, 2006). Sebaiknya regresi terbebas dari gejala ini.

Uji Multikolinearitas, mempunyai tujuan dalam penujian ada atau tidak adanya hubungan antara variabel bebas dari model regresi. Model yang baik harusnya tidak mempunyai korelasi antara variabel bebasnya (Ghozali, 2011).

Uji Autokorelasi, bertujuan untuk menentukan apakah ada korelasi antara kesalahan pengganggu selama periode t dan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ sebelumnya dalam model regresi linier. Untuk itu, uji autokorelasi hanya dapat melakukannya pada data *time series*. Oleh karena itu, pengujian autokorelasi hanya dapat dilakukan pada data *time series*. Sedangkan data *cross-sectional* dan panel tidak perlu dilakukan uji autokorelasi, uji autokorelasi hanya akan sia-sia (Basuki & Prawoto, 2017).

Pada tahapan yang terakhir yaitu melakukan suatu uji koefisien determinasi (R^2 dan Adjusted R^2), uji signifikansi simultan (uji statistik F), serta uji statistik individual (uji statistik t).

Koefisien Determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur kekuatan penjelas variabel dependen model. Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 hingga 1. Nilai yang rendah (R^2) menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen untuk menggambarkan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu menunjukkan bahwa variabel independen berisi hampir semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi variabel dependen. *Adjusted R squared* akan lebih tepat jika dilakukan karena dalam penelitian ini banyak menggunakan variabel (lebih dari 1 variabel X), sehingga dengan menggunakan *R Adjusted* jumlah informasi yang diperoleh akan lebih baik. Nilai R -kuadrat yang disesuaikan dapat ditambah atau dikurangi jika variabel independen ditambahkan ke model (Ghozali, 2018).

Uji F -statistik dapat digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama memiliki dampak yang signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian ini juga dapat menentukan apakah variabel dependen dapat diprediksi dengan menggunakan model regresi. Penelitian ini menggunakan variabel realisasi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal secara sekaligus diuji pengaruhnya terhadap kinerja instansi pemerintah (DA). Permodelan uji statistik F digambarkan yaitu dengan:

H_0 = Realisasi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal secara bersamaan tidak

memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.

H_a = Realisasi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal secara bersamaan mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.

Kriteria pengujian H_0 diterima, jika F hitung $\leq F$ tabel, sedangkan H_0 ditolak, jika F hitung $> F$ tabel.

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui apakah secara individu tiap variabel independen memiliki dampak yang signifikan terhadap variabel dependennya. Pada penelitian ini variabel realisasi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal secara individu diuji pengaruhnya terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (DA). Berikut ini permodelannya:

H_0 = Realisasi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal secara individu tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah

H_a = Realisasi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal secara individu mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah

Kriteria pengujian H_0 diterima, jika $-T$ tabel $\leq T$ hitung $\leq T$ tabel, sedangkan H_0 ditolak, jika T hitung $< -T$ tabel ataupun T hitung $> T$ tabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Regresi

Melalui hasil dari pemilihan model regresi yang menggunakan uji *Chow*, *Hausman*, serta *Langrange* disimpulkan bahwa model regresi yang cocok ialah *Random Effect Model* (REM) untuk analisis pengaruh realisasi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal terhadap kinerja instansi pemerintah sebelum pandemi Covid-19 dan *Fixed Effect Model* (FEM) untuk analisis pengaruh realisasi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal terhadap kinerja instansi pemerintah masa pandemi Covid-19. Hasil pengujian REM dan FEM disajikan pada Tabel 1 dan Tabel 2.

Berdasarkan Tabel 1 dan 2 menunjukkan hasil dari regresi model REM dan FEM masing-masing untuk pengaruh realisasi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal terhadap kinerja instansi pemerintah sebelum bahkan pada masa pandemi Covid-19. Hasil regresi ini juga sudah dilakukan dengan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas, serta uji multikolinearitas.

Hasil uji normalitas, pengaruh realisasi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal terhadap kinerja instansi pemerintah sebelum dan masa pandemi Covid-19, diketahui bahwa nilai Probability lebih besar dari 0,05, akibatnya data

Tabel 1 Hasil Analisis Regresi REM Sebelum Pandemi Covid19

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	74.13653	0.926726	79.99830	0.0000
X1	-0.007071	0.031235	-0.226377	0.8210
X2	0.216258	0.011004	19.65258	0.0000
X3	-0.014113	0.020415	-0.691343	0.4898
R-squared	0.555963	Mean dependent var		35.23900
Adjusted R-squared	0.551950	S.D. dependent var		9.265132
S.E. of regression	6.220460	Sum squared resid		12846.45
F-statistic	138.5617	Durbin-Watson stat		1.170684
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Diolah Peneliti

Tabel 2 Hasil Analisis Regresi FEM Masa Pandemi Covid19

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	70.47019	0.893380	78.88040	0.0000
X1	-0.066955	0.099055	-0.675944	0.4997
X2	0.198918	0.018245	10.90288	0.0000
X3	-0.010772	0.038789	-0.277705	0.7815
R-squared	0.523130	Mean dependent var		77.32166
Adjusted R-squared	0.437293	S.D. dependent var		13.04130
S.E. of regression	9.782772	Akaike info criterion		7.541035
Sum squared resid	23925.66	Schwarz criterion		8.114537
Log likelihood	-1070.073	Hannan-Quinn criter.		7.770654
F-statistic	6.094488	Durbin-Watson stat		1.169993
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Diolah Peneliti

telah berdistribusi normal dan telah terbebas dari masalah normalitas.

Hasil uji heteroskedasitas, grafik *scatterplot* untuk kinerja instansi pemerintah sebelum dan masa pandemi Covid-19 yang menunjukkan bahwa Titik-titik tersebut tersebar secara acak dan terdistribusi baik di atas maupun di bawah nol (0) pada sumbu Y, tidak mengelompok atau membentuk pola tertentu. Hal ini dapat disimpulkan bahwa terdapat varians dalam model regresi dalam arti varians dari semua variabel tersebut menunjukkan bahwa variabel independen dapat digunakan untuk memprediksi kinerja mekanisme instansi pemerintah sebelum dan selama pandemi covid19.

Hasil dari uji multikolinearitas, mengungkapkan bahwa ketiga variabel independen dalam kondisi sebelum bahkan pada masa pandemi Covid-19 tidak terjadi multikolonieritas karena nilai tolerance dari semua variabel di atas 0,1, sedangkan nilai VIF semua variabel di bawah 10. Oleh karena itu, ada tiga variabel independen yang dapat digunakan untuk memprediksi kinerja instansi pemerintah selama periode pengamatan, yaitu sebelum dan selama pandemi Covid-19.

Analisis Pengaruh Realisasi Belanja Pegawai terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Sebelum dan Masa Pandemi Covid-19

Berdasarkan Tabel 1 dan 2 dapat disimpulkan bahwa realisasi belanja pegawai tidak mempunyai

pengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah sebelum bahkan pada masa pandemi Covid-19 pada Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat. Hasil tersebut mendukung Waryanto (2017), bahwa Beban operasional yang berisi belanja pegawai, belanja barang, beban bunga pinjaman, bantuan hibah dan bantuan sosial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Perlu dicatat bahwa semua sektor masyarakat dan pemerintah harus mempertimbangkan bahwa belanja operasional, termasuk belanja pegawai, masih belum dapat berperan signifikan dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian yang sama oleh Yusuf (2018), bahwa belanja pegawai tidak berpengaruh signifikan terhadap efektifitas kinerja pemerintah pada Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.

Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Darwis (2015), yang menyatakan bahwa belanja pegawai memiliki dampak yang signifikan dan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintah dan kota di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2009 sampai dengan 2013. Hal ini dapat dijelaskan dengan distribusi belanja lebih banyak dialokasikan guna belanja rutin, sehingga dapat meminimalisir kemandirian keuangan daerah.

Hasil penelitian juga tidak sejalan dengan Wahyuni & Ardini (2018), bahwa belanja pegawai berpengaruh signifikan negatif terhadap

kemandirian keuangan daerah. Meningkatnya jumlah belanja pegawai, berdampak pada penurunan kemandirian keuangan daerah dan dapat berpengaruh pada stabilitas keuangan daerah. Hasil penelitian Yusuf (2018), juga menunjukkan bahwa belanja pegawai berpengaruh signifikan positif terhadap efisiensi kinerja pemerintah pada Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.

Hasil penelitian Fajerin (2018), juga menunjukkan bahwa belanja pegawai berpengaruh signifikan positif terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Hulu Sungai Tengah periode 2010-2016. Hasil penelitian tidak sejalan lainnya adalah Defitri (2020), bahwa belanja pegawai dapat memiliki dampak positif terhadap kemandirian daerah. Di satu sisi, belanja pegawai mempunyai pengaruh positif atas kemandirian daerah, dimana tingkat belanja pegawai dapat mendongkrak produktivitas aparatur daerah. Namun disisi lain belanja kepegawaian juga dapat mempunyai pengaruh yang negatif terhadap kemandirian daerah karena besarnya biaya kepegawaian akan memengaruhi tingkat belanja daerah yang selanjutnya dapat memengaruhi stabilitas keuangan daerah.

Hasil dalam penelitian ini tidak sesuai dengan penyusunan hipotesis. Hasil penelitian untuk pengaruh realisasi belanja pegawai tidak mempunyai pengaruh yang signifikan, bisa dijelaskan bahwa dengan realisasi belanja pegawai yang semakin meningkat tidak meningkatkan kinerja instansi pemerintah dan justru dapat berdampak pada menurunnya kinerja instansi pemerintah dari Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.

Selain itu, pengaruh realisasi belanja pegawai terhadap kinerja instansi pemerintah sebelum dan masa pandemi Covid-19 pada Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat menunjukkan tidak ada perbedaan.

Analisis Pengaruh Realisasi Belanja Barang terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Sebelum dan Masa Pandemi Covid-19

Berdasarkan Tabel 1 dan 2 dapat disimpulkan bahwa realisasi belanja pegawai memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kinerja instansi pemerintah sebelum bahkan pada masa pandemi Covid-19 pada Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat. Hasil tersebut mendukung penelitian Yusuf (2018) yang mengungkapkan bahwa realisasi belanja barang mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap efisiensi kinerja pemerintah pada Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.

Namun hasil penelitian ini tidak sejalan penelitian Waryanto (2017), bahwa beban operasional yang merupakan belanja pegawai,

belanja barang, beban bunga pinjaman, bantuan hibah dan bantuan sosial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan kepada pertumbuhan ekonomi. Penting untuk dicatat bahwa belanja barang tidak berkontribusi signifikan dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian lainnya yang tidak sejalan yaitu penelitian Yusuf (2018), membuktikan bahwa belanja barang tidak berdampak yang signifikan terhadap efisiensi kinerja.

Hasil dalam penelitian ini yaitu positif signifikan sesuai berdasarkan penyusunan hipotesis dikarenakan realisasi belanja barang yang semakin meningkat, maka hal tersebut berdampak pada meningkatnya kinerja instansi pemerintah dari Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat. Selain itu, pengaruh realisasi belanja barang terhadap kinerja instansi pemerintah sebelum dan masa pandemi Covid-19 pada Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat menunjukkan tidak ada perbedaan.

Analisis Pengaruh Realisasi Belanja Modal terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Sebelum dan Masa Pandemi Covid-19

Berdasarkan Tabel 1 dan 2 dapat disimpulkan bahwa realisasi belanja modal tidak memiliki dampak terhadap kinerja instansi pemerintah sebelum bahkan pada masa pandemi Covid-19 pada Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat. Hasil tersebut mendukung penelitian penelitian Imawan & Wahyudin (2014), bahwa belanja modal secara parsial tidak memiliki dampak yang positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Hasil penelitian yang sama dilakukan oleh Yusuf (2018), bahwa belanja modal tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap efektifitas kinerja pemerintah pada Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak. Hasil penelitian Wahyuni & Ardini (2018), menunjukkan bahwa belanja modal mempunyai pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap tingkat madirinya keuangan daerah.

Hasil penelitian ini berbeda dengan temuan Ariani & Putri (2016), bahwa belanja modal mempunyai dampak yang yang positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Pemerintah Daerah dengan kualitas layanan publik yang memuaskan selalu diikuti dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi. Pemerintah daerah menggunakan PAD untuk belanja, termasuk belanja modal. Belanja modal akan diterjemahkan ke dalam pembangunan daerah dan memperbaiki daerah di berbagai bidang.

Hasil tidak sejalan penelitian Ernawati & Riharjo (2017), menunjukkan bahwa belanja modal secara individu memiliki dampak positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Artinya semakin tinggi belanja modal pada suatu daerah

maka semakin tinggi pula derajat kemandirian keuangan suatu daerah.

Hasil penelitian tidak sejalan lainnya pada penelitian Waryanto (2017), belanja modal memiliki dampak signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja modal, terutama terkait pengadaan infrastruktur, dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang kan menjamin kehidupan masyarakat Indonesia yang merata. Begitu pula penelitian yang dilakukan Mulyani & Wibowo (2017), bahwa belanja modal berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan. Ini berarti belanja modal rendah, rasio efisiensi tinggi, yang menunjukkan kinerja keuangan yang buruk.

Penelitian tidak sejalan lainnya ditemukan Yusuf (2018), bahwa realisasi belanja modal memiliki dampak dari Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak. Penelitian Sari & Mustanda (2019) juga menunjukkan bahwa belanja modal memiliki dampak positif atas kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Bandung. Belanja modal yang tinggi memiliki dampak pada peningkatnya kinerja keuangan.

Hasil dalam penelitian ini tidak sesuai dengan penyusunan hipotesis. Hasil penelitian untuk pengaruh realisasi belanja modal tidak mempunyai pengaruh signifikan, dapat dijelaskan bahwa dengan realisasi belanja modal yang semakin meningkat tidak meningkatkan kinerja instansi pemerintah dan bisa saja malah berdampak pada menurunnya kinerja instansi pemerintah dari Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat. Hal ini mungkin saja terjadi dikarenakan anggaran belanja modal yang tersedia tidak banyak dan belanja modal tidak digunakan untuk tepat sasaran.

Selain itu, pengaruh realisasi belanja modal terhadap kinerja instansi pemerintah sebelum dan masa pandemi Covid-19 pada Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat menunjukkan tidak ada perbedaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan penelitian ini menunjukan bahwa realisasi belanja barang berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja instansi pemerintah. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi belanja barang, kinerja instansi pemerintah meningkat. Peningkatan kinerja instansi pemerintah dengan memberikan pelayanan publik dan memelihara fasilitas umum.

Namun berbeda dengan realisasi belanja pegawai dan belanja modal tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja instansi pemerintah sebelum dan masa pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan semakin tinggi belanja pegawai, semakin rendah efisiensi operasional instansi pemerintah karena dapat membebani anggaran negara. Namun di sisi lain, belanja pegawai dapat berpengaruh positif terhadap

kinerja instansi pemerintah, karena dapat mendorong produktivitas operasional instansi pemerintah.

Sama halnya realisasi belanja modal, semakin tinggi belanja modal akan menyebabkan kinerja instansi pemerintah menurun. Belanja modal bersifat strategis untuk membiayai sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program dan pelayanan masyarakat. Dengan mengalokasikan belanja modal secara optimal maka akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

Tidak ada perbedaan pengaruh realisasi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal terhadap kinerja instansi pemerintah sebelum dan masa pandemi Covid-19. Hal ini terjadi karena ada peran pemerintah dalam memberikan kebijakan pada masa pandemi Covid-19 yang merupakan kondisi *force majeure*.

Hal ini sudah diatasi pemerintah untuk menghadapi Covid-19 menjadi kehidupan normal baru (*new normal*), sebagaimana Direktur Jenderal Perbendaharaan mengeluarkan surat Nomor ND-562/PB/2020 tanggal 5 Agustus 2020 hal pencabutan kebijakan relaksasi penilaian IKPA tahun 2020 serta memberlakukan kebijakan menilai kembali IKPA K/L mulai triwulan III 2020. Selain itu, guna melindungi percepatan belanja publik untuk menangani Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional sekaligus menyelaraskan upaya pemantauan tahapan strategis melaksanakan anggaran selama periode Covid-19 dan mengoptimalkan hasil yang dicapai IKPA. Hal inilah yang membuat efek belanja komoditas terhadap kinerja instansi pemerintah selama pandemi Covid-19 tidak terlalu berbeda, atau menjaga kinerja instansi pemerintah pada level yang sama seperti sebelum pandemi Covid-19 atau pada masa normal.

Dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah, kiranya Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat perlu memperhatikan perencanaan anggaran hingga pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan yang ada. Penilaian kinerja dapat dilakukan monitoring secara rutin dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan memperhatikan 4 aspek yaitu kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pelaksanaan kegiatan, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dapat melakukan pembinaan terhadap seluruh bagian untuk meningkatkan kualitas penggunaan anggaran APBN dan peranan dalam mendukung penilaian IKPA dimasing-masing satuan kerja.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian hanya melakukan satu objek yaitu Satuan Kerja Direktorat Jenderal Kesehatan

Masyarakat, hal ini memungkinkan adanya perbedaan hasil dibandingkan dengan penelitian lain. Kedua, periode penelitian yang relatif singkat sehingga penulis memecah data secara triwulanan.

Pada penelitian selanjutnya diharapkan subjek penelitian dapat diperbanyak dengan dua subjek atau lebih, sehingga generalisasi hasil penelitian dapat lebih objektif, memakai periode yang lebih lama, dan memakai variabel bebas yang lebih banyak.

PENGHARGAAN

Peneliti ucapkan terima kasih kepada Prof. Haryono Umar, SE., Ak., M.Sc., CA yang telah membantu memberikan bimbingan dalam penelitian ini. Peneliti juga ucapkan terima kasih kepada satuan kerja tempat peneliti bekerja di Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat yang telah mengizinkan penggunaan data sebagai keperluan penelitian ini.

REFERENSI

- Ajija, S. R., & dkk. (2011). *Cara cerdas menguasai eviws*. Salemba Empat.
- Andirfa, M., Basri, Mc., CA, D., Majid, A., SE, Me., & D. (2016). Pengaruh belanja modal, dana perimbangan dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan kabupatendan kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 5(3), 364-369.
- Antari, N. P. G. S., & Sedana, I. B. P. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(2). <https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2018.v7.i02.p19>
- Ariani, K. R., & Putri, G. A. (2016). Pengaruh belanja modal dan dana alokasi umum terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. *Seminar Nasional dan The 3rd Call of Syariah Paper*, 5, 30-38.
- Basuki, T. A., & Prawoto, N. (2017). *Analisis regresi dalam penelitian ekonomi & bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS & EVIEWS*. PT Rajagrafindo Persada.
- Darwis, E. T. (2015). Pengaruh belanja modal dan belanja pegawai terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota provinsi Sumatera Barat. In *Jurnal Akuntansi* (Vol. 3).
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward a stewardship theory of management. *The Academy of Management Review*, 22(1), 20. <https://doi.org/10.2307/259223>
- Defitri, S. Y. (2020). Pengaruh belanja modal dan belanja pegawai terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi*, 19(2), 107-119. <https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v19i2.476>
- Ernawati, & Riharjo, I. B. (2017). Pengaruh kinerja pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(2), 531-545.
- Fajerin, M. (2018). Tata kelola belanja modal dan belanja pegawai untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan indeks pembangunan manusia di kabupaten hulu sungai tengah tahun 2010 - 2016. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 4(3), 361-376. <https://doi.org/10.35972/jieb.v4i3.240>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program ibm spss 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Imawan, & Wahyudin. (2014). Analisis kemandirian keuangan daerah provinsi jawa tengah tahun anggaran 2010-2012". *Accounting Analysis Journal*, 3(2).
- LAN. (2003). Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003. In tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen kinerja sektor publik*. STIE YKPN.
- Mulyani, S., & Wibowo, H. (2017). Pengaruh belanja modal, ukuran pemerintah daerah, intergovernmentalrevenue dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan. *KOMPARTEMEN*, XV, 57-66. <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v15i1.1379>
- Prasetya, G. E. (2005). *Penyusunan dan analisi laporan keuangan pemerintah daerah*. Andi.
- Sari, N. M. D. P., & Mustanda, I. K. (2019). Pengaruh ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(8). <https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2019.v08.i08.p02>
- Wahyuni E., & Ardini. L. (2018). Pengaruh kinerja pendapatan asli daerah belanja modal dan belanja pegawai terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(6).
- Waryanto, P. (2017). Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 2(1), 35-55. <https://doi.org/10.33105/itrev.v2i1.13>
- Yusuf, Y. (2018). Analisis kesenjangan realisasi anggaran dan efeknya pada kinerja pemerintah. *Jurnal Ilmiah Profesional Indonesia*, 2(2), 37-52.